

Apakah Teori Kecurangan Hexagon Efektif Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan BUMN?

Atam Adeanra

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis

Abstrak

Tujuan Penelitian: Menguji efektivitas Teori Fraud Hexagon dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2018–2022.

Metode: Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan sampel 17 BUMN yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Manipulasi diukur menggunakan model *F-Score*, sementara pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda.

Hasil & Pembahasan: Secara parsial, hanya kapabilitas (pergantian direksi) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas kecurangan laporan keuangan. Sebaliknya, tekanan eksternal, pengawasan tidak efektif, dan pergantian auditor tidak terbukti berpengaruh. Secara simultan, keempat elemen tersebut gagal memprediksi kecurangan secara signifikan, membuktikan bahwa ketatnya regulasi dan pengawasan berlapis di BUMN mampu meredam faktor pemicu *fraud* lainnya.

Implikasi: Temuan ini menjadi *red flag* bagi BPK dan auditor independen untuk memperketat pemeriksaan khusus saat terjadi transisi direksi. Secara teoretis, penelitian ini menggarisbawahi perlunya memasukkan elemen ego dan kolusi guna pemodelan kecurangan yang lebih utuh di masa depan.

Kata Kunci: Fraud Hexagon; F-Score; Kecurangan Laporan Keuangan; BUMN

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan yang memberikan gambaran terkait kinerja dan profil perusahaan. Laporan ini menjadi sarana esensial bagi suatu entitas untuk mengungkapkan informasi kepada pihak internal maupun eksternal. Bagi pihak yang berkepentingan, laporan keuangan berfungsi sebagai media tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja perusahaan (Achmad, 2018). Sebagai keluaran akhir dari suatu proses akuntansi, laporan keuangan memegang peranan penting karena memengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan, baik manajemen, investor, kreditur, maupun pihak lainnya (Agusputri & Sofie, 2019). Oleh karena itu, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang benar, akurat, dan terbebas dari tindak kecurangan agar para penggunanya tidak dirugikan saat mengambil keputusan (Lionardi & Suhartono, 2022). Laporan tersebut juga dituntut untuk selalu bersifat netral, tidak memihak pada kepentingan pribadi, dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku (Aprilia, 2022).

Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan publikasi laporan keuangan yang memuat informasi tidak seharusnya, sehingga mengindikasikan adanya praktik manipulasi. Ketidaksihonestan ini tentu berdampak negatif terhadap perusahaan, khususnya dalam menurunkan kepercayaan pihak eksternal terhadap keberlangsungan entitas tersebut. Salah satu pemicu utama manajemen berbuat kecurangan adalah perbedaan kepentingan dengan investor; di mana investor menuntut peningkatan kinerja perusahaan, sehingga manajemen berusaha mewujudkannya meskipun dengan cara curang (Meidijati & Amin, 2022). Tindakan curang yang sengaja dilakukan dengan melanggar aturan demi meraup keuntungan pribadi ini dikenal sebagai *fraud* (Mardianto & Tono, 2019). Secara lebih spesifik, kecurangan laporan keuangan didefinisikan sebagai perbuatan disengaja untuk memanipulasi hasil laporan agar berbeda dengan kondisi sebenarnya. Definisi umum dari manipulasi itu sendiri adalah perilaku lebih dari satu individu yang bertujuan menguntungkan diri sendiri sekaligus merugikan pihak lain, contohnya melalui tindakan melebihi angka pendapatan serta mengurangi angka utang (Suryani & Fajri, 2022).

Tindakan manipulatif semacam ini pada dasarnya bermuara pada konsep korupsi. Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang bermakna tindakan merusak, menghancurkan, kebusukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, hingga penyimpangan dari kesucian. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. (UU No. 20 Tahun, 2001), yang mengkategorikan korupsi menjadi 7 jenis tindak pidana termasuk di dalamnya kecurangan dan penggelapan jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi sejatinya merupakan salah satu bentuk dari *fraud*, yang dalam istilah sehari-hari sering disebut penipuan atau penyembunyian (The IIA's, 2015). International Standards on Auditing (ISA) juga mendefinisikan *fraud* sebagai aktivitas sengaja oleh staf, manajer, maupun pihak ketiga dalam organisasi untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melanggar hukum (Achmad, 2018). Secara global, fenomena *fraud* ini terjadi baik di sektor pemerintahan maupun non-pemerintah (Marbun, 2017).

Meskipun penyimpangan laporan keuangan merupakan skema kecurangan dengan frekuensi kasus paling sedikit secara global, dampaknya terhadap perekonomian sangatlah besar dan membuat laju ekonomi negara menjadi tidak efisien akibat peningkatan *cost of doing business*. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2018) mencatat bahwa tindakan kecurangan terus bertumbuh seiring berjalannya waktu, diawali dari niat buruk untuk melakukan kejahatan yang memicu guncangan ekonomi. Hal ini tidak bisa ditangani secara sepele karena pelaku kejahatan memiliki beragam strategi untuk menembus pengendalian internal perusahaan (Sari & Nugroho, 2020). Untuk menjelaskan alasan di balik praktik tersebut, berbagai model deteksi kecurangan terus dikembangkan, salah satunya adalah Teori Kecurangan Hexagon (*Fraud Hexagon*) yang dicetuskan

oleh Vousinas pada tahun 2019. Teori ini menganalisis kecurangan melalui enam komponen. Faktor stimulus memicu motivasi berbuat curang akibat tekanan internal maupun eksternal (Albizri et al., 2019; Nasir et al., 2017). Faktor peluang lahir dari lemahnya pengendalian internal dan pengawasan (Elnahas et al., 2017). Faktor rasionalisasi adalah pembenaran tindakan curang sebagai hal yang wajar, sering ditandai dengan pergantian auditor atau opini audit (Kusumawati et al., 2021). Faktor kemampuan merujuk pada kompetensi pelaku (seperti direksi) yang mampu memicu kecurangan bernominal besar (M. P. Sari et al., 2022). Faktor arogansi mencerminkan superioritas CEO yang merasa tidak perlu mematuhi aturan internal (Apriliana & Agustina, 2017). Terakhir, faktor kolusi mencakup hubungan kedekatan antara jajaran perusahaan dengan pihak luar seperti pemerintah untuk mempermudah perizinan (Vousinas, 2019). Tujuan penggunaan perspektif *fraud hexagon* ini adalah untuk menyajikan informasi terkait tindakan pelaku dan menganalisis pengaruhnya terhadap manipulasi laporan keuangan.

Kajian mengenai kecurangan laporan keuangan ini menjadi sangat krusial ketika diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah korporasi di bawah naungan pemerintah yang berfungsi sebagai agen pembangunan dan alat penata kebijakan perekonomian nasional (Afiska et al., 2021). Berdasarkan Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 serta Pasal 33 UUD 1945, kekayaan BUMN yang dipisahkan tetap merupakan kekayaan negara yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, BUMN membutuhkan pengawasan ketat. Namun pada praktiknya, area ini masih rawan terjadi tindak kecurangan seperti *window dressing* yakni ketidaksesuaian pencatatan untuk memperindah kinerja perusahaan di mata investor. Salah satu kasus kecurangan mencolok terjadi pada PT Garuda Indonesia pada tahun 2018, di mana perusahaan salah mencatat laba bersih akibat mengakui piutang dari perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi sebesar USD 239,94 juta sebagai pendapatan, yang mana hal ini bertentangan dengan PSAK (Mardeliani & Alvia, 2022). Adanya manipulasi semacam ini tidak hanya merugikan keuangan negara dan masyarakat, tetapi juga merusak integritas perusahaan dan citra negara (Hildayani & Serli, 2021).

Berdasarkan uraian fenomena dan teori pendukung di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Apakah Teori Kecurangan Hexagon Efektif Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan Bumh?”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Fraud Hexagon

Kecurangan laporan keuangan umumnya dilakukan guna menutupi kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya agar senantiasa terlihat baik di mata para *stakeholders*. Untuk menekan risiko terjadinya hal tersebut, pendeteksian kecurangan (*fraud*) menjadi langkah yang sangat penting (Situngkir, 2020). Sepanjang perkembangannya, model pendeteksian ini diawali oleh teori *fraud triangle* yang dicetuskan oleh (Cressey, 1954) dengan tiga elemen utama yakni *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*, yang kemudian dikembangkan oleh (Wolfe & Hermanson, 2004) menjadi *fraud diamond* dengan penambahan elemen *capability*, dan diperluas lagi oleh Crowe (2011) menjadi *fraud pentagon* dengan memasukkan unsur *ego* atau arogansi. Bentuk penyempurnaan paling mutakhir dari teori-teori pendahulunya adalah teori *fraud hexagon* yang digagas oleh Vousinas pada tahun 2019 dengan menambahkan elemen *collusion* atau kolusi (Sagala & Siagian, 2021). Teori komprehensif inilah yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini karena dinilai paling relevan dalam mendeteksi kecurangan masa kini (Puspaningrum et al., 2024), di mana keenam elemennya *stimulus* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kapabilitas), *ego* (arogansi), dan *collusion* (kolusi) saling berkaitan dan memiliki peran spesifik dalam memicu manipulasi laporan keuangan.

Stimulus (Tekanan)

Stimulus merupakan terminologi lain dari *pressure* (tekanan) dalam konsep *fraud hexagon*, yang merujuk pada suatu kondisi finansial maupun non-finansial di mana manajemen atau pegawai merasakan dorongan kuat untuk melakukan kecurangan akibat perusahaan yang tidak stabil, target kinerja yang gagal dicapai, kebutuhan dana mendesak, hingga tuntutan eksternal (Vousinas, 2019; Agusputri & Sofie, 2019). Secara lebih rinci, terdapat beberapa kondisi spesifik yang memicu tekanan tersebut hingga berujung *pada* manipulasi pelaporan, yaitu tekanan eksternal (*external pressure*) untuk menyajikan kinerja gemilang demi menarik investor, target keuangan (*financial target*) yang menuntut agen mencapai performa operasional sesuai ekspektasi prinsipal, stabilitas keuangan (*financial stability*) yang terancam sehingga memicu rekayasa agar posisi perusahaan terlihat stabil, serta kebutuhan keuangan pribadi (*personal financial needs*) yang dialami secara personal oleh eksekutif yang sering diindikasikan melalui persentase kepemilikan saham sehingga mendorong mereka untuk bertindak curang demi memenuhi kebutuhan tersebut.

Opportunity (Kesempatan)

Opportunity atau peluang mencerminkan suatu situasi, celah, atau keadaan akibat kelemahan sistem entitas yang memberikan jalan bagi seseorang untuk melancarkan tindakan kecurangan, di mana hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pengendalian internal yang lemah, buruknya sistem pengawasan manajemen, serta adanya pemanfaatan posisi jabatan oleh pelaku (Vousinas, 2019). Kemunculan peluang ini utamanya didorong oleh dua faktor krusial di lingkungan perusahaan, yaitu pengawasan yang tidak efektif (*ineffective monitoring*) di mana lemahnya sistem pengendalian gagal memantau aktivitas operasional secara ketat sehingga membuka celah manipulasi, serta sifat industri (*nature of industry*) yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi dan regulasi industri tempat entitas tersebut beroperasi, di mana kompleksitas regulasinya sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekayasa keadaan perusahaan agar tampak ideal di mata publik.

Rationalization (Rasionalisasi)

Rationalization atau rasionalisasi merupakan proses psikologis membenaran atas tindakan menyimpang yang telah dilakukan, yang sejak awal kemunculan teori kecurangan dipahami sebagai upaya pelaku untuk merasionalisasikan perilakunya agar mereka tetap dapat mempertahankan citra baik (*images*) dan menjaga kepercayaan orang lain di sekitarnya (Cressey, 1954). Dalam perspektif teori yang lebih modern, rasionalisasi adalah sikap yang menganggap bahwa manipulasi laporan keuangan merupakan suatu tindakan yang wajar dan terpaksa dilakukan demi kebaikan bersama (Vousinas, 2019), di mana pemikiran berbahaya ini dapat secara langsung mendorong terjadinya tindak pidana karena pelaku merasa bahwa merekayasa angka-angka adalah langkah yang benar dan rasional untuk menyelamatkan perusahaan atau memenuhi tuntutan atasan (Mukaromah & Budiwitjaksono, 2021).

Capability (Kapabilitas)

Capability atau kapabilitas merujuk pada kemampuan nyata serta kapasitas kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk merencanakan dan mengeksekusi skema penipuan rumit agar tidak mudah terdeteksi oleh auditor, yang mana hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi jabatan pelaku, besarnya kepercayaan yang diberikan kepadanya, serta kecakapan teknis yang dimiliki (Vousinas, 2019; Achmad, 2018). Karena posisi strategis memberikan kapasitas kekuasaan yang lebih besar untuk bertindak curang (Wolfe & Hermanson, 2004), jajaran tingkat atas seperti direksi, direktur utama, hingga kepala divisi memiliki potensi kapabilitas yang tinggi dalam memanipulasi pelaporan; yang indikatornya sering tercermin dari fenomena pergantian direksi karena hal tersebut mengindikasikan adanya kepentingan pihak tertentu untuk menggeser manajemen lama demi memuluskan skema

tertentu, dan secara empiris terbukti mampu memengaruhi potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan (Sasongko & Wijyantika, 2019).

Ego

Elemen *ego* atau arogansi mencerminkan sifat superioritas pelaku yang hanya mementingkan keuntungan pribadi karena merasa memiliki kekuasaan penuh dan kebal terhadap aturan internal, sehingga menciptakan benturan kepentingan dengan pemegang saham yang memicu konflik keagenan dan bermuara pada kecurangan laporan keuangan (Vousinas, 2019). Munculnya arogansi di mana pelaku mengabaikan etika ini umumnya dipengaruhi oleh dua karakteristik utama dari pucuk pimpinan perusahaan, yaitu narsisisme CEO (*CEO Narcissism*) yang menganggap dirinya sangat hebat dan memiliki hak mutlak atas perusahaan sehingga mudah terdorong berbuat curang, serta rangkap jabatan (*dualism position*) oleh seorang direktur utama di dalam maupun antarperusahaan yang memungkinkan terjadinya pemusatan dominasi kekuasaan pada satu individu sehingga secara psikologis memicu sifat egois dan memperbesar probabilitas manipulasi.

Collusion (Kolusi)

Collusion atau kolusi merupakan elemen terbaru dalam teori *fraud hexagon* yang diartikan sebagai bentuk kerja sama rahasia antara dua pihak atau lebih secara mufakat dan manipulatif untuk mencapai tujuan kejahatan serta menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saja (Imtikhani & Sukirman, 2021). Kehadiran kolusi memegang peranan yang sangat sentral karena dengan adanya kerja sama ini, sistem pengendalian internal dapat dengan mudah ditembus akibat pengawas dan pihak yang diawasi saling bersekongkol; sebagaimana ditegaskan (Vousinas, 2019) bahwa sebagian besar penipuan berskala besar tidak dilakukan individu melainkan didorong kesepakatan antarpihak, di mana semakin tinggi tingkat kolusi yang terjalin maka potensi dan nominal manipulasi laporan keuangan juga akan semakin membengkak dan sulit untuk dideteksi (Achmad, 2018; Jannah & Praptoyo, 2019).

Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*) secara fundamental didefinisikan sebagai tindakan kesengajaan untuk menyajikan informasi finansial secara keliru, menghilangkan data material, atau melakukan salah pengungkapan guna memanipulasi perspektif pengguna laporan sehingga menghasilkan keputusan bisnis yang menguntungkan pelaku (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2019 ;Sasongko & Wijyantika, 2019; W. M. Sari & Irawati, 2021). Meskipun skema ini diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana maupun perdata yang pelakunya memiliki berbagai strategi khusus untuk menekan risiko terdeteksi (ACFE, 2018; Diyanty, 2022), praktiknya tetap dieksekusi melalui modus seperti memalsukan dokumen, kelalaian disengaja, hingga penyalahgunaan prinsip akuntansi untuk merekayasa angka pendapatan menjadi tampak lebih besar demi menarik suntikan dana dari investor (Larum et al., 2021), yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi destruktif berupa melemahnya keandalan laporan, kekeliruan pengambilan keputusan, serta hancurnya prospek masa depan perusahaan yang sangat merugikan pihak prinsipal beserta pemangku kepentingan lainnya (Agusputri & Sofie, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022, yang diperoleh secara tidak langsung melalui publikasi di situs web resmi BEI (www.idx.co.id) dan masing-masing entitas perusahaan (Sugiyono, 2019; Priadana & Sunarsi, 2021). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 26 perusahaan BUMN, yang kemudian diseleksi menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni penarikan sampel

berdasarkan kriteria spesifik yang telah ditetapkan guna mendeskripsikan pengaruh antarvariabel dengan lebih akurat. Berdasarkan kriteria penyeleksian tersebut, diperoleh 20 perusahaan yang memenuhi syarat kelayakan sebagai sampel penelitian, sehingga total keseluruhan observasi selama lima tahun periode pengamatan berjumlah 100 data laporan keuangan, dengan rincian kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.	26
2	Perusahaan BUMN yang tidak menerbitkan laporan tahunan pada periode 2018–2022.	(6)
3	Telah menyampaikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022.	20
Total Sampel Perusahaan		20
Jumlah data observasi yang digunakan (20 perusahaan x 5 tahun)		100

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan laporan keuangan yang diukur menggunakan model F-Score, sebuah metode yang dipilih karena memiliki tingkat kesalahan (*error*) yang lebih rendah dengan cara menjumlahkan kualitas akrual dan kinerja keuangan perusahaan (Dechow, 2011). Perhitungan model ini dirumuskan:

$$F\text{-Score} = \text{Kualitas Akrual} + \text{Kinerja Keuangan}$$

di mana Kualitas Akrual berbasis RSST akrual dihitung melalui formula

$$\text{Kualitas Akrual} = \frac{(\Delta WC + \Delta NCO + \Delta FIN)}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

dengan ketentuan WC mewakili selisih aset lancar dan liabilitas jangka pendek, NCO mewakili total aset di luar aset lancar dan investasi dikurangi liabilitas non-lancar, serta FIN mewakili total investasi dikurangi total liabilitas. Sementara itu, elemen Kinerja Keuangan dikalkulasikan dari empat rasio perubahan operasional, yaitu

$$\text{Perubahan Piutang} = \frac{\Delta \text{Piutang}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

$$\text{Perubahan Persediaan} = \frac{\Delta \text{Persediaan}}{\text{Rata-Rata Total Aset}}$$

$$\text{Perubahan Penjualan Tunai} = \frac{\Delta \text{Penjualan} - \Delta \text{Piutang}}{\text{Penjualan}_t - \text{Piutang}_t}$$

$$\text{Perubahan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan}_t - \text{Pendapatan}_{t-1}}{\text{Rata-Rata Total Aset}_t - \text{Rata-Rata Total Aset}_{t-1}}$$

yang mana jika hasil akhir perhitungan F-Score melebihi batas 0,01 (1%), maka entitas terindikasi melakukan kecurangan, dan sebaliknya. Pengujian ini didorong oleh empat variabel independen yang meliputi: *stimulus* (tekanan eksternal) yang diukur dari pembiayaan utang melalui formula

$$\text{Debt To Asset Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

untuk melihat beban kewajiban (Vousinas, 2019; Faradiza, 2019) *opportunity* (pengawasan tidak efektif) yang diprosikan lewat formula

$$\text{Pengawasan tidak Efektif} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$$

serta elemen *rationalization* (pergantian auditor) dan *capability* (pergantian direksi) yang keduanya diukur menggunakan variabel *dummy*, di mana perusahaan diberi kode 1 jika melakukan pergantian tersebut pada periode 2018–2022, dan kode 0 jika tidak (Imtikhani & Sukirman, 2021; Achmad, 2018).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Regresi Linier Berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Tahapan pengujian dilakukan melalui tiga langkah utama: (1) Analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran dasar variabel; (2) Uji asumsi klasik (yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) guna memastikan model regresi akurat dan bebas bias; serta (3) Uji hipotesis yang mencakup pengujian koefisien determinasi (*McFadden R-squared*), uji F (simultan), dan uji t (parsial dengan signifikansi < 0,05) untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel independen terhadap probabilitas terjadinya manipulasi laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Penelitian bertujuan menguji pengaruh tekanan eksternal, pengawasan yang tidak efektif, pergantian auditor, dan pergantian direksi terhadap probabilitas kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2018–2022 berdasarkan perspektif teori *fraud hexagon*. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan auditan diperoleh langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masing-masing perusahaan. Dari populasi awal sebanyak 26 perusahaan, penyeleksian menggunakan teknik *purposive sampling* menghasilkan 20 perusahaan yang memenuhi kriteria. Namun, akibat adanya data ekstrem (*outlier*) yang terdeteksi saat pengujian normalitas, dilakukan *screening* lanjutan yang mengharuskan 3 perusahaan dieliminasi. Dengan demikian, sampel akhir sebanyak 17 perusahaan BUMN dengan periode pengamatan selama 5 tahun.

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	20	1,37	5,94	3,2325	1,03009
X2	20	1,37	2,90	2,1230	0,43584
X3	20	0,00	2,00	1,0500	0,75915
X4	20	0,00	3,00	1,8000	0,89443
Y	20	-5749361	9,868672835 759600	1,133723780 31408000	2,6978544845 54679300
N (listwise)	20				

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 2, menunjukkan variabel tekanan eksternal (X1) dan pengawasan tidak efektif (X2) memiliki sebaran data yang cukup stabil, terlihat dari nilai standar deviasi (1,03 dan 0,44) yang lebih kecil dibandingkan rata-ratanya (3,23 dan 2,12). Untuk variabel pergantian auditor (X3) dan pergantian direksi (X4), nilai maksimum yang mencapai angka 2 dan 3 mengindikasikan data ini menghitung frekuensi kejadian aktual selama 5 tahun, menggunakan kode *dummy* (0-1). Di sisi lain, variabel kecurangan laporan keuangan (Y) memiliki rentang nilai yang sangat ekstrem dengan standar deviasi (sekitar 2,69 miliar) yang jauh melampaui rata-ratanya (sekitar 1,13 miliar), hal ini menunjukkan bahwa tabel ini belum menampilkan data mentah awal (N=20) sebelum tahap eliminasi *outlier* dilakukan untuk mencapai target 85 sampel akhir.

Tabel 2. Uji Normalitas (Setelah dieliminasi)

	Unstandardized Residual
N	17
Test Statistic	0,165
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 2, menunjukkan perbaikan yang signifikan. Dengan jumlah sampel yang telah disesuaikan menjadi 17 observasi, pengujian tersebut menghasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat toleransi kesalahan yang ditetapkan, yakni 0,05 ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan data residual dalam penelitian ini kini telah berdistribusi secara normal.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
TE (X1)	0,901	1,110
PTE (X2)	0,788	1,628
PA (X3)	0,864	1,157
PD (X4)	0,766	1,306

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 3, seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* yang secara keseluruhan lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang jauh lebih kecil dari 10. Terpenuhinya kriteria standar ini secara mutlak mengindikasikan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Dengan demikian, model penelitian ini dinyatakan ideal dan valid untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan tanpa adanya bias akibat tumpang tindih data antarfaktor.

Tabel 4. Heteroskedastisitas

	Model	Sig.
1	(Constant)	0,124
	TE (X1)	0,384
	PTE (X2)	0,309
	PA (X3)	0,097
	PD (X4)	0,416

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 4, menunjukkan seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Sig.) yang lebih besar dari ambang batas standar 0,05. Terpenuhinya kriteria ini secara statistik mengindikasikan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi, yang berarti varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bersifat konstan atau homogen (homoskedastisitas).

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,602

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 5, menghasilkan nilai statistik 2,602, terpenuhinya asumsi ini mengonfirmasi bahwa model regresi yang dibangun memiliki observasi yang independen, tidak bias, dan secara metodologis sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap pembuktian hipotesis.

Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	22,507	7,286
1 X1	0,969	1,100
X2	-4,928	3,391
X3	1,666	1,499
X4	3,196	1,394

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 6, nilai konstanta sebesar 22,507 menunjukkan probabilitas dari kecurangan laporan keuangan (Y). Selanjutnya, koefisien arah regresi memperlihatkan variabel tekanan eksternal (X1), pergantian auditor (X3), dan pergantian direksi (X4) memiliki pengaruh yang positif, di mana setiap peningkatannya akan berbanding lurus dengan peningkatan potensi manipulasi laporan keuangan. Sebaliknya, variabel pengawasan tidak efektif (X2) justru menunjukkan arah koefisien yang negatif (-4,928), yang berarti peningkatan pada variabel ini berbanding terbalik dengan arah probabilitas kecurangan dalam model yang dibangun.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	0,598 ^a	0,358	0,144	4,406

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 7, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,144, mengindikasikan kemampuan seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel kecurangan laporan keuangan (Y) adalah sebesar 14,4%. Sementara, sisa 85,6% dijelaskan oleh berbagai faktor lain yang tidak diikutsertakan ke dalam model regresi penelitian ini. Adapun nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,598 menunjukkan terdapat tingkat hubungan yang tergolong sedang hingga cukup kuat antara gabungan variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat.

Tabel 8. Uji Statistik F

Model	Sig.
1 Regression	0,220 ^b

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 8, menunjukkan nilai probabilitas signifikansi (Sig.) sebesar 0,220 lebih besar 0,05 ($0,220 > 0,05$), dapat disimpulkan secara simultan seluruh variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini mengindikasikan model regresi yang dibangun dalam penelitian ini secara keseluruhan belum cukup *fit* atau layak untuk menjelaskan probabilitas terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Tabel 9. Uji Statistik t

Model	Sig.
(Constant)	0,009
1 X1	0,396
X2	0,172
X3	0,228
X4	0,041

Sumber: data diolah SPSS 25.

Tabel 9, menunjukkan variabel pergantian direksi (X4) merupakan satu-satunya faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas kecurangan laporan keuangan, dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,041 yang lebih kecil dari ambang batas standar 0,05 ($0,041 < 0,05$). Sebaliknya, variabel tekanan eksternal (X1), pengawasan tidak efektif (X2), dan pergantian auditor (X3) secara statistik tidak terbukti memiliki pengaruh, karena masing-masing memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,396, 0,172, dan 0,228, yang mana seluruhnya berada di atas tingkat toleransi kesalahan 5%. Temuan ini secara empiris mengindikasikan dalam konteks perusahaan BUMN yang diteliti, elemen kapabilitas (*capability*) yang direpresentasikan oleh pergantian jajaran direksi menjadi satu-satunya komponen dari Teori *Fraud Hexagon* yang terbukti memicu terjadinya manipulasi laporan keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tekanan Eksternal (Stimulus) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pengujian statistik variabel tekanan eksternal yang diprosikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,396, yang berada jauh di atas ambang batas 0,05. Hal ini menunjukkan tinggi rendahnya rasio utang tidak memicu manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Ketidaksignifikanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh karakteristik unik BUMN itu sendiri. BUMN merupakan entitas yang mendapat sokongan penuh dari pemerintah (Afiska et al., 2021), sehingga tingginya kewajiban atau utang perusahaan tidak serta-merta menciptakan tekanan atau kepanikan finansial yang ekstrem bagi manajemen, karena kreditor dan investor cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap jaminan tersirat dari negara.

Temuan ini bertolak belakang dengan elemen *Stimulus* dalam konsep *Fraud Hexagon* (Vousinas, 2019) yang mengasumsikan tekanan pihak luar untuk menyajikan kinerja gemilang akan memicu kecurangan. Meskipun teori menyatakan bahwa kebutuhan dana mendesak atau stabilitas keuangan yang terancam dapat menjadi motivasi utama fraud, kondisi ini terbukti kurang relevan jika diterapkan pada BUMN. Perlindungan regulasi dan fungsi BUMN sebagai alat penata kebijakan ekonomi nasional membuat manajemen tidak perlu mengambil risiko besar merekayasa angka hanya untuk menutupi tingginya rasio utang.

Pengaruh Pengawasan Tidak Efektif (Opportunity) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel pengawasan tidak efektif yang diukur melalui proporsi Dewan Komisaris Independen tidak terbukti berpengaruh terhadap probabilitas kecurangan laporan keuangan, dengan nilai signifikansi 0,172 (lebih besar dari 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa rasio kehadiran komisaris independen di dalam struktur tata kelola BUMN tidak menjadi penentu ada tidaknya celah bagi manajemen untuk memanipulasi data finansial. Keberadaan dewan komisaris independen di perusahaan BUMN sering kali hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pasar modal (formalitas administratif), bukan representasi nyata dari efektivitas pengawasan harian di lapangan.

Dalam perspektif Teori *Fraud Hexagon*, elemen *Opportunity* muncul ketika terdapat kelemahan sistem dan pengawasan yang memberikan jalan bagi pelaku kejahatan (Vousinas, 2019). Namun, entitas BUMN beroperasi di bawah pengawasan berlapis yang sangat ketat, tidak hanya dari internal dewan komisaris, tetapi juga dari otoritas negara seperti Kementerian BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan regulasi industri yang mengikat. Ketatnya jaring pengawasan eksternal ini secara efektif menutup celah atau peluang manipulasi, sehingga elemen *opportunity* gagal mendeteksi potensi kecurangan secara akurat pada populasi ini.

Pengaruh Pergantian Auditor (Rationalization) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pengujian terhadap variabel pergantian auditor menghasilkan nilai signifikansi 0,228, membuktikan bahwa faktor ini tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Entitas BUMN yang melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak lantas dapat diindikasikan sedang berusaha menutupi jejak manipulasi. Hal ini sangat masuk akal mengingat rotasi auditor di Indonesia diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan pergantian dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pergantian auditor adalah sebuah rutinitas kepatuhan hukum yang wajar, bukan sebuah manuver strategis manajemen untuk menyembunyikan keburukan.

Kondisi ini memberikan perspektif baru terhadap elemen *Rationalization* dalam Teori Fraud Hexagon. (Cressey, 1954) dan (Vousinas, 2019) memandang rasionalisasi sebagai upaya pembenaran, di mana (Kusumawati et al, 2021) sering mengaitkan pergantian auditor dengan upaya mencari opini audit yang lebih longgar. Namun, temuan ini membantah asumsi tersebut dalam konteks BUMN. Transparansi publik yang diwajibkan bagi perusahaan negara membuat proses rasionalisasi melalui pergantian KAP menjadi strategi yang terlalu berisiko, mudah terdeteksi, dan pada akhirnya tidak relevan untuk dijadikan indikator utama pendeteksian fraud.

Pengaruh Pergantian Direksi (Capability) terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel pergantian direksi tampil sebagai satu-satunya elemen yang terbukti berpengaruh signifikan secara statistik, dengan nilai signifikansi 0,041 dan koefisien arah yang positif. Temuan ini secara empiris menegaskan bahwa setiap terjadinya perombakan jajaran direksi pada perusahaan BUMN, probabilitas terjadinya manipulasi laporan keuangan ikut meningkat. Pergantian posisi pucuk pimpinan sering kali diikuti oleh pergeseran kebijakan strategis, orientasi target yang baru, serta upaya manajemen baru untuk membersihkan atau justru merekayasa sisa-sisa pencatatan dari manajemen lama demi menunjukkan performa instan.

Hasil ini sangat selaras dengan elemen *Capability* dalam perluasan teori kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004) dan (Vousinas, 2019). Kapabilitas merujuk pada kekuasaan, kapasitas, dan posisi strategis seseorang untuk merencanakan skema penipuan yang rumit agar tidak terdeteksi (Achmad, 2018). Direksi memiliki kontrol absolut atas operasional perusahaan. Sebagaimana didukung oleh penelitian (Sasongko & Wijyantika, 2019), pergantian direksi merepresentasikan adanya kepentingan kuat untuk memuluskan skema tertentu. Dengan demikian, elemen kapabilitas terbukti paling efektif dan sensitif dalam membaca sinyal manipulasi laporan keuangan di lingkungan BUMN.

Pengaruh Elemen Fraud Hexagon secara Simultan terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Pengujian statistik secara simultan (Uji F) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,220 yang berada jauh di atas tingkat toleransi kesalahan 0,05. Hasil ini membuktikan hipotesis kelima ditolak; yang berarti tekanan eksternal, pengawasan tidak efektif, pergantian auditor, dan pergantian direksi secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas terjadinya manipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2018–2022. Ketidakkampuan model regresi ini dalam memprediksi kecurangan secara kolektif juga tercermin dari nilai *Adjusted R Square* yang hanya mencapai 0,144 (14,4%). Angka tersebut menegaskan kombinasi keempat proksi dari elemen *fraud hexagon* yang diuji dalam penelitian ini memiliki porsi penjelasan yang sangat kecil, sementara sisa 85,6% indikasi kecurangan dipengaruhi oleh determinan lain yang tidak dilibatkan di dalam model.

Ketidaksignifikanan hasil pengujian ini memberikan evaluasi kritis terhadap daya laku Teori Kecurangan Hexagon (Vousinas, 2019) ketika diterapkan secara parsial pada entitas negara. Secara teoretis, elemen *stimulus*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability* diasumsikan beroperasi sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling menguatkan untuk memicu *fraud*. Namun, karakteristik unik BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah (Afiska et al., 2021) yang dilengkapi dengan

lapis demi lapis birokrasi, audit berlapis dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta perlindungan modal dari negara, secara efektif memutus rantai agar elemen-elemen tersebut tidak meledak secara bersamaan. Temuan ini juga sejalan dengan literatur terdahulu (Achmad, 2018) dan (Imtikhani & Sukirman, 2021) yang mengisyaratkan bahwa kejahatan kerah putih berskala masif umumnya sangat bergantung pada elemen arogansi (*ego*) dan kerja sama manipulatif pihak dalam dan luar (*collusion*). Absennya dua elemen krusial tersebut dalam pengujian ini kemungkinan besar menjadi alasan utama mengapa secara simultan model deteksi ini belum cukup tangguh dalam membedah anatomi manipulasi laporan keuangan di tubuh BUMN.

SIMPULAN

Teori Kecurangan Hexagon tidak sepenuhnya efektif dalam mendeteksi manipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN periode 2018–2022 jika diuji tanpa menyertakan seluruh elemennya. Secara parsial, hanya elemen kapabilitas (*capability*) melalui proksi pergantian direksi yang terbukti signifikan memicu probabilitas kecurangan, mengindikasikan bahwa momen transisi kekuasaan sering dimanfaatkan manajemen baru atau lama untuk merekayasa kinerja pelaporan. Di sisi lain, variabel tekanan eksternal, pengawasan tidak efektif, dan pergantian auditor terbukti tidak berpengaruh secara individu, dan secara simultan keempat variabel tersebut gagal memprediksi kecurangan secara utuh. Hal ini membuktikan bahwa karakteristik perlindungan negara dan birokrasi pengawasan yang berlapis di BUMN mampu meredam tekanan finansial dan menutup celah pengawasan konvensional.

KONTRIBUSI

Aplikatif dari *Fraud Hexagon Theory* pada entitas berkarakteristik khusus seperti BUMN, sekaligus menggarisbawahi urgensi penyertaan elemen arogansi (*ego*) dan kolusi (*collusion*) untuk pemodelan fraud yang lebih komprehensif di masa depan. Secara praktis, temuan ini memberikan sinyal yang penting bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), auditor independen, Kementerian BUMN, dan investor publik. Hasil ini mendorong pemangku kepentingan untuk secara khusus memperketat audit pengawasan tepat pada saat masa transisi manajerial atau perombakan susunan direksi terjadi, karena titik inilah yang terbukti secara empiris paling rentan disalahgunakan untuk melancarkan manipulasi pelaporan keuangan.

REFERENSI

- Achmad. (2018). Pengaruh Kualitas Audit dan Auditor Switching Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 110–125. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20961/jab.v18i2.380.g77>
- Afiska, L., Handayani, D. F., & Serly, V. (2021). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 784–798. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.429>
- Agusputri & Sofie. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Fraudulent Financial Reporting dengan Menggunakan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 14(2), 105–124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v14i2.5049>
- Albizri, A., Appelbaum, D., & Rizzotto, N. (2019). Evaluation of financial statements fraud detection research: a multi - disciplinary analysis. In *International Journal of Disclosure and Governance* (Issue Pcaob 2016). Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/s41310-019-00067-9>
- Aprilia, R. (2022). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan melalui Fraud Hexagon. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(2), 143–151.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26487/akrual.v15i2.21681>

- Apriliana & Agustina. (2017). The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 154–165. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/jda.v9i2.4036>
- Cressey, D. R. (1954). Other People ' s Money . A Study in the Social Psychology of Embezzlement. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 45(4), 464–465.
- Dechow. (2011). Predicting Material Accounting Misstatements. *Predicting Material Accounting Misstatements*. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x>
- Diyanty. (2022). Hexagon Fraud in Fraudulent Financial Statements: the Moderating Role of Audit Committe. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(1). <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.03>
- Elnahas, A. M., Jain, P. K., & Mcinish, T. H. (2017). Exploring the manipulation toolkit : the failure of Doral Financial Corporation Exploring the manipulation toolkit : the failure of Doral Financial Corporation. *Applied Economics*, 00(00), 1–15. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1319563>
- Faradiza. (2019). Fraud Pentagon dan Kecurangan Laporan Keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Fakultas*, 4988, 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1060>
- Hildayani & Serli. (2021). Pengaruh Tekanan, Peluang, Rasionalisasi dan Nilai Etika terhadap Intensi Kecurangan Karyawan: Studi Kasus pada Perusahaan BUMN 1,2. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(4), 734–748. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.422>
- Imtikhani & Sukirman. (2021). Determinan Fraudulent Financial Statement Melalui Perspektif Fraud Hexagon Theory Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), 96–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/jab.v19i1.3654>
- Jannah, F., & Praptoyo, S. (2019). Fraud Hexagon Theory dalam mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–22.
- Kusumawati et al. (2021). Analisis Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud Perusahaan Properti Real Estate Terdaftar di BEI 2017-2021. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 19(1), 75–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jaa.19.1.75-93>
- Larum, K., Zuhroh, D., & Subiyantoro, E. (2021). Fraudlent Financial Reporting : Menguji Potensi Kecurangan Pelaporan Keuangan dengan Menggunakan Teori Fraud Hexagon. *AFRE Accounting and Financial Review*, 4(1), 82–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5957>
- Lionardi, M., & Suhartono, S. (2022). Pendeteksian Kemungkinan Terjadinya Fraudulent Financial Statement menggunakan Fraud Hexagon. *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 29–38. <https://doi.org/10.31294/moneter.v9i1.12496>
- Marbun, A. N. (2017). Suap di Sektor Privat : Dapatkah Dijerat? *Integritas Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 53–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.140>
- Mardeliani, S., & Alvia, L. (2022). Analisis Kecurangan Laporan Keuangan Menurut Hexagon Fraud Model pada Perusahaan BUMN Tahun 2016-2020. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(7). <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i7.458>
- Mardianto & Tono. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita*, 4(April 2018), 87–103. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i1.3349>
- Meidijati & Amin. (2022). Detecting Fraudulent Financial Reporting Through Hexagon Fraud Model : Moderating Role of Income Tax Rate. *International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)*, 3(2), 311–322. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.5555/ijosmas.v3i2.196>
- Mukaromah, I., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Fraud Hexagon Theory dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

- 2015-2019. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 14(1), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v14i1.355>
- Nasir et al. (2017). Real earnings management and financial statement fraud: evidence from Malaysia. *International Journal of Accounting & Information Management*. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-03-2017-0039>
- Puspaningrum, I., Nindito, M., & Yusuf, M. (2024). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Indikasi Financial Statement Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(3), 253–271. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2254>
- Sagala & Siagian. (2021). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Fraudulent Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(November), 245–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3956>
- Sari, M. P., Mahardika, E., Suryandari, D., Raharja, S., & Ntim, C. G. (2022). The audit committee as moderating the effect of hexagon ' s fraud on fraudulent financial statements in mining companies listed on the Indonesia stock exchange. *Cogent Business & Management*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2150118>
- Sari, W. M., & Irawati, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraudulent Financial Reporting. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 139–152. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.22557>
- Sasongko, N., & Wijyantika, S. F. (2019). Faktor Resiko Fraud Terhadap Pelaksanaan Fraudulent Financial Reporting (Berdasarkan Pendekatan Crown ' s Fraud Pentagon Theory). *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 67–76. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.7809>
- Situngkir, N. C. (2020). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Fraud Score Model and Fraud Pentagon Theory : Empirical Study of Companies Listed in the L . Q . 45 Index. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 23(3), 373–410. <https://doi.org/10.33312/ijar.486>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Metode Penelitian Sugiyono. In *Metode Penelitian*.
- Suryani, E., & Fajri, R. R. (2022). Fraud Triangle Perspective : Artificial Neural Network Used in Fraud Analysis. *General Management*, 23(188), 154–162. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.188.22>
- UU No. 20 Tahun. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001*.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud : the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 12, 38–42. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1361-3723\(04\)00065-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1361-3723(04)00065-X)